

**PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN
PINJAN (EKS-SP) DI KELURAHAN RAWANG EMPAT KECAMATAN
BANDAR PETALANGAN TAHUN 2013**

Oleh :

M Junaidi Aries

Email :eddieconeli2@yahoo.com

Pembimbing: H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus.bina widya Jl H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp.baru Pekanbaru 28293
Telp/fax 0761-63277

Abstract

This research was conducted at the Village Office Rawang E, mpat. Samples taken are data about users UEK-SP with a sample of 37 people taken at random. As well as data analysis using quantitative techniques. Based on the results of the research were processed based on the results of research and analysis on the Implementation writer Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) dikelurahan District of Bandar Rawang Four Petalangan, it can be concluded that the presence of UEK-SP program in the Village District of Bandar Rawang Four Petalangan categorized less accomplished with scale 34-67% due to the implementation of a mechanism based UEK-SP not achieved the goal to reduce poverty. Because, the fund distribution process difficult and poorly understood prospective beneficiaries, the accountability of funds and the lack of participation is not transparent, the implementation of activities that receive less guidance and assistance in opening a business for the beneficiaries and also the requirements of users who are not prioritized for the poor as stipulated on technical guidance or direction UEK-SP program in the Village District of Bandar Rawang Four Petalangan.

Keyword : EKS-SP, Programme, Village Economic

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintntah daerah yang dilaksanakan selama ini sangat sentralistis yang menimbulkan kesenjangan semakin tajam antara wilayah dengan wilayah lainnya, hal ini juga dapat terlihat antara kota dan desa dan diperkuat lagi kesenjangan antara kaya dan si miskin yang semuanya ini disebabkan karena tidak ratanya

pembangunan. Selain itu, terbatasnya kewenangan membuat daerah tidak berdaya dan daerah dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pembangunan.

Banyak hal yang dihadapi daerah terutama didalam memanfaatkan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara hati-hati yang dalam perkembangan regulasi global berkaitan pula dengan masalah lingkungan. Untuk

itu, daerah dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dalam upaya membangkitkan perekonomian daerah yang sinergis dengan sistem perekonomian antar daerah regional dan bahkan global.

Pemerintah merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat baik peranan pembangunan maupun peranan sebagai pelayanan publik. Dalam rangka melaksanakan peranan tersebut, diperlukan keberadaan aparatur sebagai subjek penyelenggaraan roda pemerintahan. Percepatan proses pembangunan dan upaya untuk mendekatkan.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program Pembedayaan Desa merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Disisi lain, jumlah pemanfaat UEK-SP tahun 2013 berjumlah 268 orang pemohon, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pemohon Yang Masuk Pada Program UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2013.

No	Tahun	Keterangan			
		Jumlah Pemohon	Jumlah Peminjam yang lunas	Jumlah Peminjam yang belum lunas	Persentase (%)
1	Jan	17	15	2	11,76
2	Feb	19	17	2	10,52
3	Mar	21	16	5	23,80
4	Apr	22	19	3	13,63
5	Mei	24	20	4	16,67
6	Jun	21	18	3	14,28
7	Jul	21	16	5	23,80
8	Agu st	25	19	6	24
9	Sept	25	20	5	20
10	Okt	22	18	4	18,18

11	Nov	29	17	12	41,37
12	Des	22	16	6	27,27
Jumlah		268	211	57	21,26

Sumber: Koperasi Rawang Empat, 2013

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan pemanfaat yang masuk dari tahun 2013 berjumlah 268 orang yang terdiri dari 211 orang peminjam yang lunas 57 peminjam yang belum lunas hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang dialami pemanfaat misalnya, dana yg diterima tidak dipergunakan dengan baik, sehingga terjadi kemacetan dalam membayar angsuran kredit UEK tersebut.

Sebagai acuan dilapangan adanya anggota masyarakat yang permohonan dihadapkan dengan sejumlah persyaratan yang rumit seperti jaminan yang harus ada. Hal ini tentunya sangat mengecewakan bagi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat bisa melakukan pinjaman karena sebagian besar mereka tidak memiliki jaminan/anggunan seperti surat berharga yang bisa menjadi jaminan dalam pencairan dana tersebut. Meskipun pemerintah telah mencoba memberikan pinjaman kepada masyarakat Kelurahan Rawang Empat yang telah bersifat produktif bukan konsumtif sehingga dana yang dikucurkan dapat dimanfaatkan dengan baik seperti membuka usaha, atau lahan perkebunan dan sebagainya.

Kenyataan lain yang ditemui dilapangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu:

1. Terlihat kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan ini, hal ini dibuktikan dengan terjadinya tunggakan angsuran pembayaran setiap bulannya
2. Penggunaan dana yang kurang tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan gejala dan permasalahan tersebut maka fokus penelitian dalam usulan penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Desa/Kelurahan oleh karena itu ditetapkan judul sebagai berikut :*Pelaksanaan Program Usaha*

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2006-2013.

II. Perumusan Masalah

“Bagaimanakah Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2013”.

III. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian adalah untuk melihat pelaksanaan program dan faktor-faktor penghambat Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan tahun 2013.

IV. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

- Masukan pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- Referensi kepada peneliti lain yang tertarik mengkaji masalah pelaksanaan kebijakan UEK-SP atau program sejenis.
- Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik khususnya dengan Ilmu Pemerintahan yang mengkaji tentang program pemberdayaan desa (PPD) di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan.

V. Konsep Teori

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2008:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan

kebijakan publik penjelas yaitu yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain: Kepres, Impres, Kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.

Selanjutnya *George C Edwards III* dalam Sujianto (2008) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakannya yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakannya sukses? Untuk itu perlu diperizin usaha pertambahanangan empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh *Edward III* termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut *karz* dan *Kahn* komunikasi vertikal mencakup lima hal:

- Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja)
- Informasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan)
- Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasiannya
- Perintah-perintah
- Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksana program

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah

memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

3) Sikap (disposisi)

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh *Meter and horn* disposisi diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Grindle dalam Nugroho (2008:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat Implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 3. Derajat perubahan yang diinginkan
 4. Kedudukan pembuat kebijakan
 5. Siapa pelaksana program
- Sementara itu situasi implementasinya adalah:
1. Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat
 2. Karakteristik lembaga penguasa
 3. Keputusan dan daya tanggap.

Implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang di harapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergatung pada *implementation capacity* dari organisasi birokrasi pemerintahan atau kelompok organisasi/aktor yang di percaya mengemban tugas

mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut (dalam Sumaryadi, 2005: 80)

b. Kebijakan Publik

Menurut Cart I. Friedrick dalam Nugroho (2004 : 53) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Menurut *Nakamura* dan *Smalwood*, kebijakan publik berarti serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan *Presman* dan *Wadavsky* mendefenisikan kebijakan publik sebagian suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Dilain pihak *Amara Raksataya* berpendapat bahwa kebijakan itu adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga kebijaksanaan itu akan membuat tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata taktik atau strategi yang ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Program” berarti rancangan mengenai azas serta usaha yang dilaksanakan. Program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan meski tidak semuanya bisa direalisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut

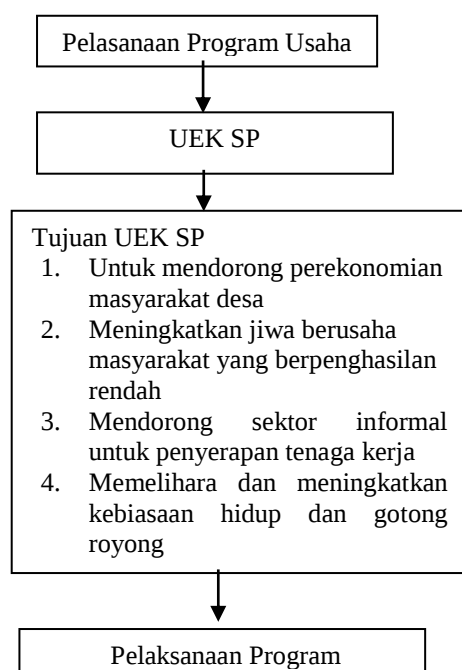
dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Namun sebaik apapun program tanpa ada implementasi (pelaksanaan) mustahil sasaran dan tujuan-tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Implementasi berarti penerapan pelaksanaan, karena itu implementasi kebijakan berupa program merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

c. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat banyak konsep pada studi implementasi kebijakan yang dipilih. Dunn (Darwin;2000:56) menyebut terdapat dua sudut pemahaman terkait studi implementasi yaitu sudut pandang ilmu administrasi negara dan ilmu politik. Dari sudut pandang ilmu administrasi negara, pada awalnya implementasi hanya dilihat semata - mata pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien saja. Namun menjelang akhir PD II, pandangan ini makin tidak populer. Sedangkan dari sudut pandang ilmu politik ternyata tidak sebatas itu, ia jauh menjangkau sampai ketentuan kebijakan administratif dan legislatif yang baru, perubahan – perubahan referensi publik dan teknologi baru.

VI. Kerangka Pikiran



Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

VII. Penelitian Terdahulu

1. Ridwan Hamidi, 2013, Analisis Kapasitas Lembaga UED-SP Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas lembaga UED-SP dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dipersyaratkan dalam prinsip-prinsip program PPD bagi masyarakat miskin masih belum memadai. Kondisi ini terjadi karena penyaluran Dana Usaha Desa (DUD) belum tetap sasaran, dimana secara keseluruhan jumlah anggota yang mendapatkan bantuan modal adalah orang yang mampu (memiliki agunan dan usaha) memenuhi segala persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART UED-SP. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas lembaga UED-SP adalah masih rendahnya kemampuan dan pemahaman pengelola terhadap program UEDSP, baik secara implementasi maupun secara teknis administrasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara program.
2. Kartika Sari, 2012, Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Desa Melalui Program UED Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dengan hasil penelitian yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program pemberdayaan desa melalui program usaha ekonomi desa di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berjalan baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan rencana tahunan dan rencana jangka

menengah, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.

VIII. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dikarenakan masih terdapatnya masyarakat miskin di daerah tersebut.

IX. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama, untuk siapa kenyataan yang diperoleh itu hendak digeneralisasikan. Populasi ini diperlukan oleh suatu terdiri dari : pengelola UEK-SP, Lurah, ketua LPM Rawang Petalangan, pengawas umum kelurahan, serta pemanfaat UEK-SP.

2. Sampel

Sampel yaitu orang yang dijadikan sumber penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pengelola UEK-SP, Lurah, ketua LPM Rawang Empat, pengawas umum kelurahan serta pemanfaat UEK-SP. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3. Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 2013

No	Sub – Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Lurah	1	1	100
2	Ketua LPM Rawang Empat	1	1	100
3	Pengelola UEK-SP	4	4	100
4	Pengawas umum kelurahan	1	1	100
5	Pemanfaat UEK-SP 2013	268	30	11.19

	Jumlah	275	37	13.45
--	--------	-----	----	-------

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

X. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan diambil beberapa sampel dari setiap unsur yang dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Sehingga teknik penarikan sampel dari unsur pemerintah karena dinilai sedikit maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel atau teknik penarikan sensus.

XI. Teknik pengumpulan data

- Observasi yaitu suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang langsung.
- Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan angket pertanyaan yang di tujukan kepada masyarakat. Wawancara dilakukan agar memperoleh kejelasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada hasil kuisioner yang disebarkan. Wawancara dilakukan dengan ketua UEK-SP, Kepala TU UEK-SP, dan pemanfaat UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- Kuisioner atau angket yaitu menyusun daftar pertanyaan secara tertulis pokok permasalahan penelitian yang disebarkan kepada responden terpilih untuk diisi berdasarkan alternatif jawaban yang ada sehingga penulis mendapatkan bukti konkrit.

a. Jenis Data

1. Data Primer,

Data yang diperoleh secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator untuk memperoleh hasil analisa yang jelas mengenai Pelaksanaan Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan

Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan selain itu juga terdiri dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pelaksanaan Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari : Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh melalui :
 1. Buku-buku
 2. Dokumen dan
 3. Data yang telah tersedia di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan

XII. Teknik Analisis Data

Pada prinsipnya analisa data merupakan proses pengolahan data dan menyusun data secara sistematis agar dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa data deskriptif yakni merupakan metode pengolahan data yang diperoleh dengan ungkapan data atau uraian dalam bentuk pertanyaan sesuai dengan masalah penelitian Pelaksanaan Kebijakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2013 untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik penelitian kuantitatif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Identitas Responden

Responden merupakan suatu unsur penentu dari suatu permasalahan yang ada pada penelitian ini. Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden

dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran quisioner yang sudah disebarkan kepada responden.

Tahapan dari uraian pembahasan dari bab ini penulis akan menjelaskan identitas dari pada responden. Adapun identitas yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden menurut jenis kelamin dapat diidentifikasi sebagaimana terlihat dalam tabel :

Tabel 3.1 Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	20	54,05
2	Perempuan	17	45,95
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015

Pada tabel 3.1 diketahui diatas bahwa lebih banyak jumlah responden laki-laki yaitu 20 orang atau 54,05% dari pada perempuan yaitu 17 orang atau 45,95%. Disamping itu tidak menjadi tolak ukur bagi masyarakat Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan, karena yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan dan memajukan Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan ini lebih baik.

b. Tingkat Pendidikan Responden

Diantara hal yang lebih penting dalam kehidupan adalah pendidikan. Selain sebagai bukti kemajuan berfikir dalam diri manusia tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang juga akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan.

Didalam kenyataan tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan dan jabatan yang ada dikantor-kantor pemerintahan maupun swasta serta lembaga-lembaga non departemen.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan terlihat jelas arti dan peranan pendidikan tentunya bagi para responden dalam penelitian ini, sehingga pemberian informasi yang tepat terhubung dalam permasalahan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	5	13,51
2	SLTP	10	27,03
3	SLTA	15	40,54
4	Akademi/perguruan tinggi	7	18,92
	Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat pendidikan responden sebagian besar adalah tamat SLTA yang berjumlah 15 orang atau 40,54% kemudian tamat SLTP yang berjumlah 10 orang atau 27,03%, selanjutnya tamat SD berjumlah 5 orang atau 13,51%, sedangkan tamatan perguruan tinggi berjumlah 7 orang atau 18,92%. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden bisa dikatakan tinggi karena sebagian besar responden adalah tamatan SLTA.

c. Kelompok Umur Responden

Identitas responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	3	8,10
2	31-40	9	24,33
3	41-50	17	45,95
4	51-60	8	21,62
	Jumlah	37	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dalam pengelompokan tingkat usia rseponden dari sampel kelompok umur antara 21-30 tahun berjumlah 3 orang atau 8,10%, kelompok umur 31-40 tahun berjumlah 9 orang atau 24,33%, kelompok umur 41-50 berjumlah 17 orang atau sekitar 45,95%, kelompok umur 51-60 berjumlah 8 orang atau sekitar 21,62%.

d. Jenis Pekerjaan Responden

Adapun identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat diidentifikasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	2	5,40
2	Swasta	5	13,51
3	Pedagang	14	37,84
4	Petani	10	27,03
5	Ibu rumah tangga	5	13,52
	Jumlah	37	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis pekerjaan dari 37 responden memiliki berbagai macam pekerjaan yaitu, ibu rumah tangga berjumlah 5 orang atau 13,52%, petani berjumlah 10 orang atau 27,03%, pedagang berjumlah 14 orang atau sekitar 37,84%, sementara PNS berjumlah 2 orang atau 5,40% dan swasta berjumlah 5 orang atau 13,51%.

II. Hasil Penelitian

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Kota yang berkedudukan diwilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lurah mempunyai tugas yakni pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Namun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan, sandang pangan dan perumahan serta keamanan dan kesehatan. Jika dilihat secara umum dikatakan cukup sejahtera. Namun yang perlu ditingkatkan adalah pemerataan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program pemerintah yakni UEK-SP seperti yang telah berjalan saat sekarang ini. Dan untuk melihat pelaksanaan kegiatan UEK-SP itu sendiri maka perlu kembali ditinjau proses pelaksanaannya seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Proses Penyaluran Dana

Untuk menyukseskan suatu pelaksanaan kesejahteraan ekonomi masyarakat perlu ditinjau alur program kegiatan UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini dalam rangka memperlihatkan kemudahan bagi pengguna dana sebagaimana yang telah direalisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan dari responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang diberikan oleh para responden selengkapnya akan penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Tanggapan Responden Mengenai Membuat Surat Perjanjian

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	25	67,57
Kurang Terlaksana	12	32,43
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai surat perjanjian yaitu 25 orang responden (67,57%) menyatakan terlaksana, 12 orang responden (32,43%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam proses penyaluran dana dengan syarat membuat surat perjanjian terlaksana.

Tabel 3.6

Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Dana Sesuai Kebutuhan

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	19	51,35
Kurang Terlaksana	18	48,65
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan yaitu 19 orang responden (51,35%) menyatakan terlaksana, 18 orang responden (48,65%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam proses penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan terlaksana.

Tabel 3.7

Tanggapan Responden Mengenai Membuat Rencana Pencairan Dana (RPD)

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	15	40,54
Kurang Terlaksana	20	54,05
Tidak Terlaksana	2	5,40
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai Rencana Pencairan Dana yaitu 15 orang responden (40,54%) menyatakan terlaksana, 20 orang responden (54,05%) menyatakan kurang terlaksana dan 2 orang responden (5,40%) menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam membuat rencana pencairan dana kurang terlaksana.

Hal ini diperjelas lagi oleh ketua UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan bapak Arisman pada tanggal 6 Maret 2015 pukul 10.20 WIB beliau mengatakan bahwa dalam proses penyaluran dana UEK-SP ini memang telah diberikan sosialisasi sejak awal yang mana dalam proses penyaluran dana ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis program desa yakni dengan membuat surat perjanjian sebagai syarat administrasi yang mana digunakan oleh pemanfaat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebab sangat banyak peminat dan pendaftaran yang masuk untuk semua masyarakat hanya saja bagi yang lolos verifikasi tinggal menunggu jadwal yang telah dijanjikan saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ataupun proses penyaluran dana UEK-SP ini telah dilakukan sesuai dengan petunjuk sehingga masyarakat hanya tinggal memenuhi segala macam persyaratan administrasi saja.

2. Pertanggungjawaban Dana

Pertanggungjawaban dana sebagaimana telah dijelaskan bahwa merupakan tanggung jawab pengelola UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang mana sebagai pengelola perlu melakukan atau mengadakan forum musyawarah yang

bertujuan memperlihatkan transparansi terhadap masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, maka diperoleh data tentang tanggapan dari pada responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang telah diberikan oleh para responden selengkapny akan penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Tanggapan Responden Mengenai Forum Musyawarah

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	13	35,13
Kurang Terlaksana	20	54,05
Tidak Terlaksana	4	10,82
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai forum musyawarah yaitu 13 orang responden (35,13%) menyatakan terlaksana, 20 orang responden (54,05%) menyatakan kurang terlaksana dan 4 orang responden (10,82%) menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai forum musyawarah kurang terlaksana.

Tabel 3.9
Tanggapan Responden Mengenai Menyebarluaskan Info Status Dana

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	9	24,33
Kurang Terlaksana	25	67,57
Tidak Terlaksana	2	5,40
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai menyebarluaskan info status desa yaitu 9 orang responden (24,33%) menyatakan terlaksana, 25 orang responden (67,57%) menyatakan kurang terlaksana dan 2 orang responden (5,40%) menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai menyebarluaskan info status desa kurang terlaksana.

Tabel 3.10
Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan Status Keuangan

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	15	40,54
Kurang Terlaksana	16	43,24
Tidak Terlaksana	6	16,22
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai melaporkan status keuangan yaitu 15 orang responden (40,54%) menyatakan terlaksana, 16 orang responden (43,24%) menyatakan kurang terlaksana dan 6 orang responden (16,22%) menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai melaporkan status keuangan kurang terlaksana.

Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala tata usaha UEK-SP Kelurahan Rawang Empat pada tanggal 7 Maret 2015 pada pukul 10.05 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk pertanggungjawaban dana UEK-SP itu sendiri merupakan tanggung jawaban pengelola UEK-SP dan pemegang otoritas yang mana wajib dipertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa kemudian menyebarluaskan status keuangan melalui papan informasi atau media lain secara rutin. Hanya saja terkadang masyarakat kurang memperhatikan saja sehingga sebagian masyarakat banyak yang tidak tahu informasi tersebut. Jadi bagi kami sebagai pengelola sudah melakukan tugas dengan maksimal tinggal bagaimana partisipasi masyarakat agar sama-sama saling memberikan masukan sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses demi mensejahterakan masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut, bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan UEK-SP ini bentuk pertanggung jawaban dana yang dilakukan baik yang dilakukan dalam forum musyawarah dan melalui media secara transparan sehingga status keuangan yang ada bisa diketahui oleh masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat juga harus bisa ambil andil untuk turut serta dalam pengawasan pengelolaan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan UEK-SP ini memang seharusnya menjadi perhatian penting bagi masyarakat selaku pemanfaat. Yang mana sudah terdapat dalam pedoman program.

Untuk lebih jelasnya, berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data tentang tanggapan dari responden mengenai pelaksanaan kegiatan UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Tanggapan Responden Mengenai
Membelanjakan Dana Pinjaman

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	30	81,08
Kurang Terlaksana	7	18,92
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai membelanjakan dana pinjaman yaitu 30 orang responden (81,08%) menyatakan terlaksana, 7 orang responden (18,92%) menyatakan kurang. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai membelanjakan dana pinjaman kurang terlaksana.

Tabel 3.12
Tanggapan Responden Mengenai
Pengembalian Pinjaman

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	10	27,03
Kurang Terlaksana	27	72,97
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai pengembalian dana pinjaman yaitu 10 orang responden (27,03%) menyatakan terlaksana, 27 orang responden (72,97%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai pengembalian dana pinjaman kurang terlaksana.

Tabel 3.13
Tanggapan Responden Mengenai Membuat
Buku Induk

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	17	45,94
Kurang Terlaksana	20	54,05
Tidak Terlaksana	0	0

Jumlah	37	100
---------------	-----------	------------

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai membuat buku induk yaitu 17 orang responden (45,94%) menyatakan terlaksana, 20 orang responden (54,05%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai membuat buku induk kurang terlaksana.

Tabel 3.14
Tanggapan Responden Mengenai Membuat
Laporan Bulanan

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	15	40,54
Kurang Terlaksana	22	59,46
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai membuat laporan bulanan yaitu 15 orang responden (40,54%) menyatakan terlaksana, 22 orang responden (59,46%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai membuat laporan bulanan kurang terlaksana.

Tabel 3.15
Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan
dan Pendampingan

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	8	21,62
Kurang Terlaksana	29	78,38
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai pembinaan dan pendampingan yaitu 8 orang responden (21,62%) menyatakan terlaksana, 29 orang responden (78,38%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai pembinaan dan pendampingan kurang terlaksana.

Tabel 3.16
Tanggapan Responden Mengenai Syarat
Pemanfaat

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	12	32,43
Kurang Terlaksana	20	54,05
Tidak Terlaksana	4	10,82
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai Syarat Pemanfaat yaitu 12 orang responden (32,43%) menyatakan terlaksana, 20 orang responden (54,05%) menyatakan kurang terlaksana dan 4 orang responden (10,82%) menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai syarat pemanfaat kurang terlaksana.

Dijelaskan juga melalui wawancara dengan pemanfaat UEK SP ibu Ririn pada tanggal 4 Maret 2015 pada pukul 09.15 WIB sebelumnya mengaku sudah membelanjakan dana bantuan UEK-SP yang mana sangat besar manfaat UEK ini. Saya, sudah empat kali meminjam untuk berjualan lontong dan sebagainya, hasilnya sangat memuaskan. “Dulu saya tidak bisa memiliki kulkas, mesin cuci dan keperluan rumah tangga lainnya, sekarang berkat UEK usaha saya kebutuhan terpenuhi.”

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa memang sebagian masyarakat telah melaksanakan atau menggunakan dana UEK-SP ini sebagaimana yang dibutuhkan untuk modal usaha. Sebagian masyarakatpun memang ada yang tidak tepat waktu dalam pengembalian pinjaman ke pengelola. Dari hasil beberapa wawancara peneliti sebagian masyarakat kelurahan simpang baru yang tidak membelanjakan dana pinjaman tersebut dikarenakan tidak adanya pendampingan dan pembinaan secara intensif sehingga masyarakat ada yang merasa kewalahan ataupun kurang cermat dalam menggunakan pinjaman tersebut. Kurangnya kontrol ataupun pengawasan kepada yang bertanggungjawab menyebabkan kurang efisien dan efektifnya dana pinjaman yang telah dicairkan sehingga sulit untuk mengembalikan.

4. Persyaratan Pemanfaatan

Dari rangkaian prorgam UEK-SP dapat terlihat untuk memperoleh dana pinjaman yang di kucurkan dari pemerintah maka perlu adanya kriteria

pemanfaat yang layak mendapat bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang tanggapan responden, guna melihat bagaimana hasil tanggapan yang diberikan responden kepada peneliti. Selengkapnya penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Tanggapan Responden Mengenai Kelayakan Usaha

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	20	54,05
Kurang Terlaksana	15	40,55
Tidak Terlaksana	2	5,40
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai kelayakan usaha yaitu 20 orang responden (54,05%) menyatakan terlaksana, 15 orang responden (40,55%) menyatakan kurang terlaksana dan 2 orang responden (5,40%) menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai kelayakan usaha terlaksana.

Tabel 3.18
Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Jasa dan Pengembalian

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	18	48,65
Kurang Terlaksana	19	51,35
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai penetapan jasa dan pengembalian yaitu 18 orang responden (48,65%) menyatakan terlaksana, 19 orang responden (51,35%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai penetapan jasa dan pengembalian kurang terlaksana.

Tabel 3.19
Tanggapan Responden Mengenai Kriteria Pemanfaat

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	25	67,57
Kurang Terlaksana	12	32,43
Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai kriteria

pemanfaat yaitu 25 orang responden (67,57%) menyatakan terlaksana, 12 orang responden (32,43%) menyatakan kurang terlaksana. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai kriteris pemanfaat terlaksana.

Tabel 3.20
Tanggapan Responden Mengenai Perguliran

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	9	24,33
Kurang Terlaksana	25	67,57
Tidak Terlaksana	2	5,40
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai perguliran yaitu 9 orang responden (24,33%) menyatakan terlaksana, 25 orang responden (67,57%) menyatakan kurang terlaksana dan 2 orang responden (5,40%). Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai perguliran kurang terlaksana.

Tabel 3.21
Tanggapan Responden Mengenai Agunan

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	14	37,84
Kurang Terlaksana	20	54,05
Tidak Terlaksana	3	8,11
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai agunan yaitu 14 orang responden (37,84%) menyatakan terlaksana, 20 orang responden (54,05%) menyatakan kurang terlaksana dan 3 orang responden (8,11%). Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai agunan kurang terlaksana.

Tabel 3.22
Tanggapan Responden Mengenai Penyitaan

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Terlaksana	8	21,62
Kurang Terlaksana	24	64,86
Tidak Terlaksana	5	13,52
Jumlah	37	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas di tanggapan responden mengenai penyitaan yaitu 8 orang responden (21,62%) menyatakan terlaksana, 24 orang responden (64,86%) menyatakan kurang terlaksana dan 5 orang responden (13,52%). Dari hasil tersebut dapat di simpulkan mengenai penyitaan kurang terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengenai persyaratan pemanfaat selaku calon pemanfaat UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan bapak Tarsono pada tanggal 2 Maret 2015 pada pukul 15.10 WIB beliau mengatakan bahwa sangat sulit untuk memperoleh dana pinjaman dari masyarakat miskin seperti kami. Karena tidak memiliki jaminan apapun untuk diserahkan sebagai syarat administrasi. Padahal memang mau digunakan sebagai modal usaha akan tetapi justru banyak dana yang cair bagi usaha yang mau lebih di besar atau di kembangkan lagi yang lebih dahulu cepat cair dana pinjaman UEK-SP tersebut. Sementara kami harus menunggu lama bahkan ada yang tidak bisa cair dengan alasan kekurangan persyaratan.

Berdasarkan hasil penelitian tertulis dan wawancara kepada pemanfaat yang telah ataupun yang masih dalam proses menunggu dana pinjaman cair maka penulis menyimpulkan bahwa kriteria pemanfaat memang masih sulit bagi masyarakat miskin yang memang merupakan sasaran utama dari program UEK-SP tersebut. Akan tetapi justru banyak digunakan oleh yang telah memiliki usaha sebelumnya.

Hal ini berketerkaitan erat antara modal sosial dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin dalam kerangka pemberdayaan ekonomi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan modal non materi, dalam hal ini berbentuk modal sosial, mempunyai peran yang cukup penting dalam mensukseskan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Hanya ada aturan-aturan tertulis terkait dengan hak dan kewajiban anggota UEK-SP saja yang diketahui oleh anggota yang ada didalam kelompok. Meskipun ada aturan tertulis di dalam kelompok, hanya sebagian responden yang mengaku mengetahui dengan pasti aturan-aturan tertulis yang ada didalam kelompok. Sisanya,

responden tidak terlalu yakin mengetahui adanya aturan tertulis dan tidak tertulis.

Dari keempat Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini telah disesuaikan dengan kriteria pengukuran yang mana pelaksanaannya “**kurang terlaksana**” yang berskala pada 34-76% saja.

Dan diperkuat dengan wawancara dengan kepala UEK-SP Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Arisman pada tanggal 4 Maret 2015 pada pukul 10.20 WIB yang mengatakan bahwa “pelaksanaan UEK-SP di Kelurahan Rawang Empat ini sudah dijalankan sebagaimana yang telah tertera pada petunjuk teknis kegiatan, segala prosedur telah dijalankan semaksimal mungkin tetapi masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tersendatnya program ini. Alasannya sulitnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang telah diberlakukan ditambah lagi dengan lambanya pengembalian pinjaman dari pemanfaat sendiri.

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis tentang Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dikelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya program UEK-SP di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan dikategori kurang terlaksana dengan skala 34-67% karena berdasar mekanisme pelaksanaan kegiatan UEK-SP tujuan yang tidak tercapai yakni mengentaskan kemiskinan. Karena, proses penyaluran dana yang sulit dan kurang dipahami calon pemanfaat, pertanggung jawaban dana yang kurang mendapat partisipasi serta tidak transparan, pelaksanaan kegiatan yang

kurang mendapat pembinaan dan pendampingan dalam membuka usaha bagi pemanfaat dan juga persyaratan pemanfaat yang tidak diprioritaskan bagi masyarakat miskin sebagaimana yang dicantumkan pada pedoman atau petunjuk teknik program UEK-SP di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan.

II. Saran

Dalam melanjutkan program UEK-SP di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan untuk masa mendatang, maka disarankan :

1. Perlu ada upaya dari pihak-pihak terkait baik itu anggota, pengurus, UEK-SP untuk saling bekerja sama mengoptimalkan potensi modal sosial yang timbul dari hubungan-hubungan sosial yang terjalin sehingga tidak adanya kecemburuan sosial terhadap masyarakat dalam menggunakan dana pinjaman UEK-SP di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan
2. Kepada pemerintah sebaiknya persyaratan program ini ditinjau kembali karena tujuan dan persyaratan terkesan bertentangan dimana tujuan program adalah mengentaskan kemiskinan namun dalam persyaratan terkesan menitik beratkan masyarakat.
3. Mekanisme penyaluran program hendaklah lebih dimudahkan lagi agar meminimalisir waktu.
4. Kepada masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menggunakan dana bantuan secara optimal sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
5. Kepada pengelola agar perlunya transparansi pengelolaan karena merupakan wahana mencari kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Nugroho, 2002. *Administrasi Dan Pemerintahan*. Jakarta Ghalia Indonesia

- Agustino, 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Hanin Dita.
- Arifin, Bustanul, 2002. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Dunm, William N.2001. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanindita.
- Hamidi, Ridwan, 2013. *Analisis Kapasitas Lembaga USD-SP Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi Unri. Tidak diterbitkan.
- Ndraha, 2003. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2008. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi)*.PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Media Sarana. Jakarta
- _____,2006. *Analisis Kebijakan Negara*. PT Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Pamudji, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Bumi aksara, Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Dan Laporan Hasil Penelitian*.2009, Pekanbaru, Fisipol UIR.
- Salim, Emil, 1994, *Satu Tahun Relita, Kertas Kerja*, Disampaikan Pada Konferensi Esei, Yogyakarta.
- Santosa, Budi, Priyo, 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Representatif Kultur Dan Struktural*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sari, Kartika. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Desa Melalui Program UED Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Skripsi Unri. Tidak diterbitkan.
- Dokumentasi :**
 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Gubernur Riau No :78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau.